

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kompleksitas politik Internasional tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi dalam interaksi para aktornya. Apalagi jika persetujuan berkaitan dengan kepentingan vital seperti kedaulatan negara dan keamanan nasional pemicu sebuah sengketa. Sengketa merupakan sebuah konstruksi sosial dimana istilah ini mengacu pada persepsi pihak satu terhadap lainnya atas persoalan tertentu (Filstiner, 1980: 15-16). Adanya perbedaan preferensi yang erat dengan psikologis identitas dan reputasi nasional. Negara memiliki suatu garis imajiner geografis berdekatan yang kerap kali bersinggungan antara satu sama lain menimbulkan sebuah konflik perbatasan. Pada 2018 para peneliti mengungkapkan setidaknya 120 negara terlibat dalam beberapa jenis sengketa teritorial. yang melibatkan 100 wilayah, benua atau pulau terpisah (Fravel, 2018: 9-10).

Terdapat dua kategori dasar penyebab sengketa teritorial, yakni i) adanya ketidaksepakatan mengenai garis batas daratan antara dua pihak negara atau lebih, ii) adanya persaingan kedaulatan antara dua pihak yang mengklaim wilayah target (Tanaka, 2016: 5-6). Perilaku suatu negara berdaulat dalam sengketa teritorial tersebut diperkirakan guna mengejar *status quo* dan revisionis (Fravel, 2018: 8). Salah satu aktor yang terlibat ialah Tiongkok dalam proses pertumbuhan internalnya yang cepat mendorong Tiongkok untuk mendefinisikan kembali kepentingan nasional mereka. Penggunaan kekuatan dan kebutuhan yang juga meluas memicu adanya perebutan teritorial. Sejak tahun 1949, Tiongkok telah

terlibat dalam 23 konflik teritorial dengan pihak lain. Dalam beberapa konflik yang pecah, Tiongkok telah berhasil merebut tanah yang tidak dikuasai sebelumnya (Fravel, 2018: 12).

Pada sengketa teritorial ini tidak sepakat mengenai garis yang Tiongkok maupun India klaim sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Secara garis besar, ‘Permainan Besar’ yang tengah berlangsung selama 50 tahun berfokus pada dua area utama yakni sepanjang perbatasan Himalaya dengan Aksai Chin sekitar 37.350 km persegi (sektor barat) dan Arunachal Pradesh sekitar 32.330 mil persegi (sektor timur) (Maxwell, 1981: 12). Terminologi *Line of Actual Control* (LAC) muncul dalam penyebutan area demarkasi yang memisahkan kendali teritorial China dan wilayah kontrol India tersebut. Istilah LAC ini diasosiasikan oleh Perdana Menteri China, Zhou Enlai saat berkirim surat dengan Jawaharlal Nehru pada 1959. LAC memuat pertimbangan Tiongkok atas garis sepanjang 2000 km mencakup keseluruhan Arunachal Pradesh di Tibet Selatan berdasarkan *Mccartney-Macdonald Line*. Sedangkan, India menaksir wilayahnya sekitar 3.488 km mengklaim Aksai Chin (Ladakh) yang dilandasi *Ardagh-Johnson Line* dan *McMahon Line* (Maxwell, 1981: 14-15).

Pecahnya perang LAC diawali dari pemberontakan Tibet pada 1959 akibat Dalai Lama ke-14 yang melarikan yang memicu intensitas konflik yang meningkat pada 1962. Pada 1967 hubungan semakin memanas dengan pertempuran Nathu La dan Cho la di Sektor Tengah. Kemudian munculnya insiden Tulung La di Sektor Timur pada 1975 membuat 4 kematian tentara India. Perang terus berlanjut hingga 1987 yang memperebutkan Arunachal Pradesh sebagai “Tibet Selatan”. Pada 2005

hingga 2013 terjadi gencatan senjata dimana kedua pihak berfokus pada upaya resolusi. Namun perang kembali pecah pada Juni 2020 di Lembah Galwan, Ladakh yang menewaskan 20 tentara India dan 4 tentara Tiongkok.

Dengan krusialnya wilayah juga persaingan dengan India dalam mengakui kedaulatan Tiongkok di garis kontrol utama LAC mengindikasikan situasi kebuntuan diplomatik (*Diplomatic Deadlock*) (Maxwell, 1981: 7). Situasi deadlock dalam negosiasi terjadi ketika tidak adanya kesepakatan yang ter substansi secara berkepanjangan (Maxwell, 1981: 8). Selain itu, adanya penundaan dalam proses negosiasi, salah satunya pada pertemuan ke-14 pada 2022 di ChusulMoldo yang mengalami penundaan untuk resolusinya (Gilani, 2020: 10).

Tiongkok menilai persaingan ini sebagai konflik asimetris yang ‘lebih rendah sebab India dianggap sebagai kekuatan baru yang asimetris dengan kekuatannya (Pardesi, 2021: 13). Kehadiran India di Dalai Lama dipandang sebagai polemik atas dugaan terjalinnya kemitraan India dengan rival terbesar Tiongkok yakni Amerika Serikat dan Jepang. Persoalan ini tentu mempengaruhi tercorengnya reputasi pada prioritas yang tinggi (*High-Context*) serta pengaruh Tiongkok di Tibet. Tiongkok mengadopsi *High-context of group harmony*, yang menjelaskan bahwa individu terikat dengan masyarakat atau bangsanya khususnya menjaga ‘muka’ atau reputasi untuk menghindari penghinaan bagi apa yang mereka naungi. Kehilangan ‘muka’ berarti ‘lebih buruk daripada kematian’ (Analysis & Nationalism, 2010: 4). Konsep *Miànzi* yang bersifat subjektif mengacu pada penilaian terhadap kinerja dan identitas dalam sebuah interaksi sosial pada hubungan antar orang dan kelompok eksternal (Analysis & Nationalism, 2010: 5).

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai relevansi *Miànzi* dan nasionalismenya dengan konflik Tiongkok-India (*Sino-Indian Conflict*) atas *Line of Actual Control* yang mengarah pada situasi kebuntuan diplomatik (*diplomatic deadlock*). Penelitian mengungkapkan bagaimana Tiongkok mengaktualisasikan nilai tradisional *Miànzi* dalam kebijakannya, baik verbal maupun tertulis terkait martabat yang tercoreng oleh India atas kepentingan nasionalnya. Penelitian ini menganalisis pengaruh nilai atau gagasan tradisional terhadap proses negosiasi dalam penyelesaian sebuah konflik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada pengantar diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

**“Bagaimana implikasi *Miànzi* dan nasionalisme terhadap isu *Line Actual Control* (LAC) antara Tiongkok-India yang mempengaruhi kebuntuan diplomatik?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, tujuannya yakni untuk menjelaskan permasalahan dengan memberikan deskripsi atas subjek dan variabel penelitian yang penulis angkat. Subjek penelitian tersebut adalah Tiongkok yang mengalami konflik LAC dengan India. Penelitian ini ditinjau dari sisi nasionalisme dan nilai budaya *Miànzi*

Tiongkok sebagai variabel berdampak pada situasi kebuntuan diplomatik (*diplomatic deadlock*).

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Secara khusus dalam menjawab pertanyaan, penelitian ini guna menganalisis penerapan nilai dan kebudayaan Tiongkok, yakni *Miànzi* dalam menghadapi ancaman India atas sengketa perbatasan LAC sebagai perwujudan nasionalisme Tiongkok yang menyebabkan kebuntuan diplomatik (*Diplomatic deadlock*) dalam penyelesaian konflik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat baik secara praktis maupun akademis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis termasuk memperkaya literatur di dalam studi Hubungan Internasional. Topik yang penulis angkat berkaitan dengan isu perbatasan secara spesifik pada LAC. Selain itu, diharapkan menambah dapat menambah informasi literatur terhadap salah satu perspektif budaya Tiongkok yakni atas konsepsi budaya *Miànzi* Tiongkok, juga kebuntuan diplomatik sebagai output atas meningkatnya nasionalisme Tiongkok dalam menghadapi India yang menjadi instrumen dalam menjalankan politik luar negerinya.

#### 1.4.2 **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi praktikal, terkhusus para pembuat kebijakan yang berelasi dengan Tiongkok karena penulis mendeskripsikan keputusan politik Tiongkok berdasarkan nilai budayanya, yakni *Miànzì* atau ‘wajah’. Selain itu, penelitian juga meneliti relevan dengan persoalan diplomasi dalam kasus kebuntuan diplomatik yang dipengaruhi oleh nasionalisme dan nilai budaya. Dengan demikian, adanya penelitian ini memberikan gambaran bahwa berbagai faktor dapat berpengaruh pada tindakan aktor negara, salah satunya nilai budaya yang mempengaruhi persepsi dan tindakan dalam interaksinya. Diharapkan pula dapat memberi wawasan bagi para negosiator untuk Tiongkok agar dapat memahami satu diantara nilai budaya Tiongkok dalam proses negosiasi serta meningkatnya pemahaman atas esensi perbatasan bagi sebuah negara.

#### 1.5 **Kerangka Pemikiran Teoritis**

Berdasarkan penelusuran pustaka, peneliti menemukan beberapa literatur ilmiah yang membahas tentang sengketa perbatasan Tiongkok-India. Penelitian tersebut mengangkat instrumen yang beragam seperti budaya, ekonomi, sosial atau politik dalam mengkaji permasalahan. Penulis mengelaborasi konflik dan variabel yang hendak diteliti yakni konflik atas isu LAC Tiongkok-India dengan variabel nasionalisme menggunakan nilai budaya *Miànzì*. Namun, penulis sulit menemukan jurnal terdahulu dengan konflik dan variabel yang sama persis dengan penelitian ini. Meskipun demikian, penulis berusaha menganalisis argumen dengan jurnal yang dianggap serupa yang mencakup garis besar kebutuhan penelitian.

Beberapa jurnal yang menjelaskan mengenai variabel serupa ialah "*The Deadlocked Deadlock: Sino-Indian Boundary Dispute*" oleh Neville Maxwell (Maxwell, 1981), dalam jurnal ini meninjau mengenai kondisi *deadlock* atau kebuntuan dalam proses negosiasi konflik perbatasan Tiongkok-India (Sino-Indian Border). Jurnal ini membahas secara lengkap kronologi yang terjadi dengan situasi kebuntuan antara keduanya. Maxwell banyak berkontribusi atas pemikirannya terhadap konflik ini berangkat dari Jawaharlal Nehru yang kerap menolak persuasi Tiongkok karena mempertahankan wilayah strategis. Konflik ini merupakan "*extreme complexity conflict*" atau konflik dengan kompleksitas yang ekstrim karena persepsi internasional yang kontradiktif (Maxwell, 1981: 5).

Penelitian serupa mengenai konflik LAC antara Tiongkok-India salah satunya dari jurnal "*Coagulating The Line Of Actual Control Between India And China*" oleh Deepak Loomba (Loomba, 2020). Dalam jurnal ini menyampaikan bahwa ada empat hal yang mempengaruhi kompleksitas sengketa LAC dari aksi Tiongkok yaitu i) persoalan taktik yang berkaitan geografis, ii) strategi yang dirancang; iii) Psiko-ekonomi yang berarti faktor ekonomi berperan besar mempengaruhi keputusan; iv) reaksi yang diartikan adanya ikatan emosional dengan wilayah sengketa.

Penulis juga bersumber pustaka yang dituliskan oleh Stephen Wescott berjudul "*Mao, Nehru and the Sino-Indian Border Dispute: A Poliheuristic Analysis*" (Westcott, 2019: 9). Penelitian ini tentang faktor kognitif yang mempengaruhi alasan Tiongkok dan India dalam merancang kebijakan *status quo* sebelum eskalasi ialah dengan mengadopsi teori Poliheuristik sebagai alat

kebijakan analisis terkait pembuatan keputusan atau proses *decision-making*. Pecahnya perang pada 1962 menandai adanya nasionalisme dan sentimen yang kuat di antara keduanya. Kemudian untuk melihat pandangan India dari sisi kognitif, penulis mengadopsi “*The Behavioral Logic behind India’s Tough Foreign Policy toward China*” oleh Hu Shi Sheng dan Wang Jue (2020) menyebutkan bahwa sisi kognitif India yang terobsesi mendapatkan absolut security dan mengembangkan strategi hegemoni. India melakukan aksi provokasi karena Tiongkok membangun infrastruktur perbatasan yang mengancam keamanan bagi India. Oleh karena itu, India mencari keadaan yang ‘*safer, more defensive and absolutely secured border*’ menjadi karakteristik *zero-sum game* pada LAC.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa konflik perbatasan di LAC antara Tiongkok-India merupakan konflik yang kompleks. Konflik tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kepentingan geopolitik maupun ikatan emosional dengan wilayah sengketa. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menganalisis pengaruh faktor lain, seperti nilai budaya dan moral yang berpengaruh pada proses pembuatan keputusan. Oleh karena itu, dari penelitian ini penulis berfokus pada perspektif Tiongkok dengan implikasi *Miànzì* sebagai wujud budaya Tiongkok dan nasionalisme sebagai nilai moral bangsa terhadap sengketa LAC. Penulis mengangkat sisi kognitif bias yang mempengaruhi pola dalam menciptakan kebijakan bagi pembuat keputusan. Penulis berharap memberikan perspektif lain seperti elaborasi perspektif kognitif dan rasional dalam menganalisis sengketa LAC yang mengalami kebuntuan diplomatik dalam penyelesaiannya antara Tiongkok-India.

Penelitian ini mengadopsi berbagai teori sebagai alat analisis atas variabel yang penulis harapkan dapat melengkapi penelitian atas kasus LAC yang melibatkan Tiongkok-India. Urgensi penelitian ini adalah untuk memahami pentingnya budaya ‘wajah’ atau *Miànzi* dalam memediasi negosiasi terkait konsep diri terhadap individu lain, Penulis menggunakan Teori Poliheuristik dan *Face Negotiation Theory* untuk menganalisis bagaimana implikasi *Miànzi* dan nasionalisme terhadap isu LAC antara Tiongkok-India yang mempengaruhi kebuntuan diplomatik.

### **1.5.1 Teori Poliheuristic**

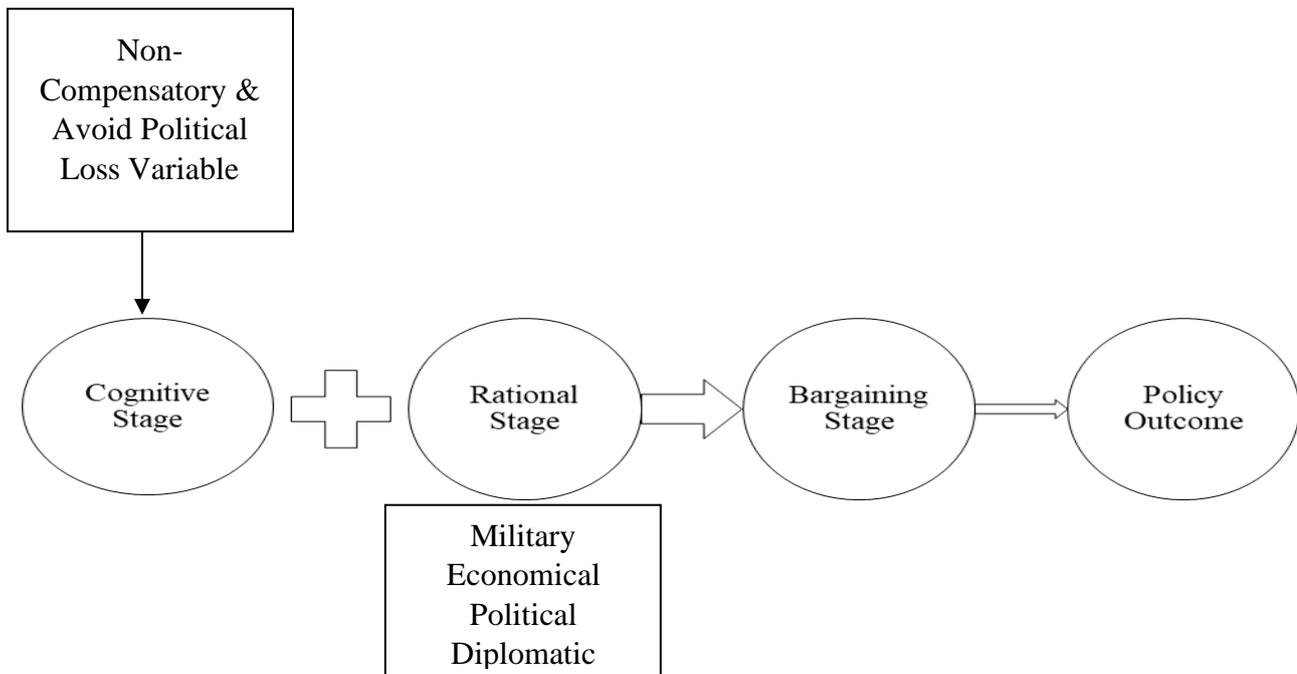
Setiap entitas negara mengalami proses tertentu dalam menghasilkan keputusan. Keputusan tersebut berasal dari pertimbangan atas berbagai variabel baik internal berupa kognisi maupun eksternal yang mendorong rasionalitas aktor. Untuk menjembatani keduanya, Alex Mintz (2004: 3-4) menciptakan sebuah Teori Poliheuristik pada 1993. Teori ini mengembangkan pendekatan analisis kebijakan luar negeri yang lebih komprehensif, dimana mempertimbangkan unsur kognitif dalam sebuah output kebijakan yang rasional. Para pembuat keputusan yang memiliki ambisi idiosinkratik, agenda, perspektif dan kepribadian yang menjadi esensi untuk memahami keadaan terutama dalam isu sengketa perbatasan. Berdasarkan teori ini, negara dipimpin oleh seseorang yang berusaha memaksimalkan keuntungan dari berbagai pilihan.

Istilah poliheuristik berasal dari ‘poli-’ yang berarti ‘banyak’ dan heuristik ‘penilaian atau penemuan’. Istilah tersebut merujuk pada mekanisme kognitif yang digunakan dalam menyederhanakan keputusan kebijakan luar negeri yang

kompleks (Mintz, 2004: 4-5). Teori ini mengacu pada gagasan yang mengkombinasikan elemen pilihan rasional dan pendekatan kognitif untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana kebijakan dapat dibuat oleh para pembuat kebijakan. Teori Poliheuristik melihat politik dan nilai domestik sebagai '*the essence of decision*'. Premis pertama pada teori ini yakni para pembuat keputusan menemui situasi berbagai pilihan dengan minimnya informasi. Dalam rangka menyaring pilihan, pemimpin membentuk jalan pintas (heuristik) kognitif untuk membuat keputusan. Premis kedua, yaitu pembuat keputusan mengadopsi minat dan pengalaman masa lalu sebagai standar untuk komparasi opsi kebijakan (Redd, 2003: 9).

Teori Poliheuristik berlandaskan argumen bahwa manusia bukanlah aktor yang konsisten dalam rasionalitasnya melainkan adanya psikologi bias untuk membangun pemahaman terhadap situasi yang kompleks. Bias tersebut menjadi kerangka heuristik sebagai 'jalan pintas' yang diadopsi dari budaya, kepribadian, perasaan maupun kepercayaan dalam mekanisme pembuatan keputusan (Redd, 2003: 12). Adanya karakteristik '*beliefs*' atau kepercayaan, yakni i) kausal (causal belief) yang menghasilkan strategi aktual, ii) prinsip (principal belief) yang memberi dimensi normatif terhadap aktor, kemudian iii) general (worldviews) menyampaikan pandangan dalam kerangka yang menyeluruh (Redd, 2003: 15).

Sehingga untuk memahami alur teori poliheuristik yang penulis analisis, penulis menyajikan dalam alur skema sebagai berikut



Gambar 1. 1 Skema Analisis Teori Poliheuristik (Brockherde, 2016: 20)

Tahap pertama, yakni fase kognitif dimana para pembuat kebijakan menerapkan ‘non kompensatori berbasis aturan dimensi’ yang berarti menyeleksi kebijakan berdasarkan kriteria ‘*critical dimension*’. Seleksi *critical dimension* didasari atas dimensi politik para aktor pembuat keputusan. Dimensi politik tersebut berkaitan dengan ideologi, nilai budaya hingga kepercayaan. Secara spesifik, budaya mempengaruhi kognisi individu termasuk pemimpin. Budaya sebagai kunci pembuatan keputusan mencakup struktur, strategi dan taktik. Lebih lanjut, karakteristik pembuatan keputusan tersubstitusi dari kultur nasional, nilai dan

norma serta pandangannya terhadap orang lain (Podrug, 2011: 8-9). Teori Poliheuristik memiliki karakteristik mengenai aspek kognitif seperti basis dimensi (*dimension-based*), non kompensatoris (*non-compensatory*) serta *avoid political loss*. Konsep ini menentukan alur pemikiran aktor pembuat keputusan pada teori poliheuristik.

Pembuatan keputusan atas kultur yang mempertimbangkan karakteristik kognisi budaya, yaitu kolektivistik dan individualistik. Budaya kolektivitas mengedepankan esensi harmonisasi dan integrasi yang diadopsi sebagian besar negara Asia. Karakteristik ini memahami kognisi individu dalam pembuatan keputusan yang sesuai baik dengan masyarakat maupun kepentingan para pembuat keputusan. (Redd, 2003: 11-12). Proses pemilihan tersebut mempertimbangkan indikator *avoid political loss* bagi aktor (Redd, 2003: 18). Alternatif kebijakan yang tidak sesuai dieliminasi agar tidak mencederai kepentingan politis yang hendak dicapai (Redd, 2003: 19).

Tahap kedua, yakni melibatkan penentuan solusi optimal berdasarkan analisis rasional. Pada tahap ini aktor mempertimbangkan aspek lain setelah memilih berdasarkan dimensi yang krusial. Kebijakan tersebut memaksimalkan benefit sebagai prioritas pemimpin negara. Penilaian tersebut mempertimbangkan akibat kerugian bagi negara atau aktor pembuat keputusan. Variabel lebih lanjut yang mempengaruhi seperti faktor militer, politik, ekonomi dan diplomatik. Pada tahap ini pemimpin mulai menerapkan secara rasional atau *rational choice* (Mintz, 2004: 17). *Rational choice* ini mengenai hubungan diplomatik jangka panjang, kerjasama di berbagai bidang menunjang kesejahteraan ataupun strategi yang

meningkatkan pengaruhnya atas negara lain. Pada konteks sengketa perbatasan, seorang membuat keputusan menerapkan strategi berdasarkan kebijakan yang dipilihnya, baik menggunakan kekerasan, menyelesaikan dengan damai ataupun melalui kompromi atau untuk mempertahankan *status quo*.

Tahap ketiga, yaitu tawar-menawar (*bargaining*) yang menjadi tahap lanjutan bagi para pembuat keputusan. Dimana mereka memilih opsi yang memenuhi kedua kriteria baik kognitif maupun emosional. Tak jarang, pemimpin mengejar ‘*grand strategy*’ untuk kepentingan negaranya melalui misi berupa ideologi dan nilai yang dianut (Westcott, 2019: 23). Berdasarkan teori ini, tahap terakhir, yakni output berarti kebijakan sudah dipertimbangkan dari nilai dan dimensi politik yang memiliki kesesuaian tinggi. Kebijakan tersebut pun memuaskan aktor serta meminimalisir kerugian bagi pembuat keputusan baik secara kognitif maupun rasional.

Dalam rangka mengimplementasikan visinya, pemimpin mengembangkan konseptual secara implisit maupun eksplisit yang dirancang untuk memenuhi prioritas dan kesesuaian berdasarkan situasi yang dihadapi. Pada penelitian ini, teori poliheuristik digunakan sebagai alat analisis setiap keputusan pembuat keputusan Tiongkok terhadap isu LAC telah mengalami situasi ‘*stalemate*’ selama bertahun-tahun. Salah satunya, factor pada *dimension process* yaitu nasionalisme Tiongkok dan India yang kian menguat turut mempengaruhi perkembangan sengketa. Kekuatan nasionalis terbukti dapat menguat seiring kebangkitan mereka secara global terlebih menghadapi isu perbatasan historikal. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai sikap kedua negara menarik sentimen nasionalis yang mendarah daging.

Penjelasan tersebut dijelaskan oleh Manson “*Contending Nationalisms: China and India March into the Twenty-First Century*” (Manson, 2010).

Teori ini dapat menjembatani pendekatan kognisi sebuah pemimpin negara seperti budaya Tiongkok yakni *Miànzi* dengan pandangan rasional Tiongkok. Budaya menjadi salah satu faktor dalam proses *decision making* setiap pemimpin negara. Beberapa budaya, seperti politik domestik, nilai, kepercayaan, adat salah satunya budaya wajah yang menjadi esensi. Penulis berusaha mengelaborasi dalam analisis deskriptif atas proses dibalik terjadinya kebuntuan diplomatik dalam konflik LAC antara Tiongkok-India. Konflik tersebut disinyalir karena variabel kognitif berupa nasionalisme dan pengaruh nilai *Miànzi* ‘face’ atas keputusan Tiongkok di dalamnya.

### **1.5.2 Face Negotiation Theory**

Dalam interaksi sosial, setiap individu mengalami berbagai variasi perilaku yang diterima atas lingkungan sosialnya. Sebagaimana, pengalaman yang berasal dari internal atau perasaan individu seperti malu, canggung, memalukan, bangga ataupun sombong. Hal tersebut berelasi erat dengan situasi sosial yang dimaknai perlunya ketenangan berwujud penerimaan. Ketenangan ini berelevansi dengan konsep ‘muka’ yang perlu diperjuangkan saat adanya ketidakamanan. ‘Wajah’ adalah identitas atau citra yang kita pertahankan di depan publik. Wajah mewakili diri dalam masyarakat dengan menunjukkan sikap yang diinginkan oleh mereka (2011: 10-12). Oleh karena itu, manusia mengukur ‘muka’ sebagai tingkat penerimaan dalam status sosialnya. Kehilangan muka (*losing face*) atau menyelamatkan muka (*saving face*) menjadi fokus dalam teori yang dikembangkan

oleh Stella Ting Toomey dan Atsuko Kurogi pada 1998 ini (Ting-Toomey, 2011: 14).

Toomey (2011: 5) mengembangkan teori ini berdasarkan fokus utamanya yakni esensi 'wajah' dalam sosial budaya. Pengembangan teorinya mengarah pada fungsi '*Facework*' atau fungsi wajah dalam interaksi manusia. Toomey (2011: 8-9) mengkonseptualisasikan wajah sebagai perasaan yang diklaim individu yang menguntukan dalam konteks relasional. Wajah dikaitkan dengan rasa hormat, kehormatan, status, reputasi, kredibilitas dan reputasi. *Facework* mengacu pada pesan verbal dan non verbal yang membantu memulihkan 'kehilangan' muka untuk menegakkan martabat.

Dimensi individualisme dan kolektivisme berfungsi sebagai kisi konseptual dalam menjelaskan variasi makna 'wajah' di seluruh dunia. Toomey (2011: 11) mengindikasikan bahwa individualistik cenderung pada berorientasi untuk pribadinya atau '*I-identity*' juga penerimaan diri. Sedangkan kolektivitas merujuk pada strategi menyelamatkan martabat wajah pada penerimaan interaksinya '*We-identity*'. Strategi juga berkaitan dengan pencegahan (*preventif*) dan penanganan (*restorative*) pada *facework*. Pada pencegahannya berelevan dengan aksi menutupi, menunda ataupun mengendalikan kemungkinan yang berpengaruh pada citra diri. Sedangkan penanganan (*Restorative*) mengarah untuk pada stabilisasi atau menguatkan perasaan yang telah diserang (Toomey, 2011: 13-14).

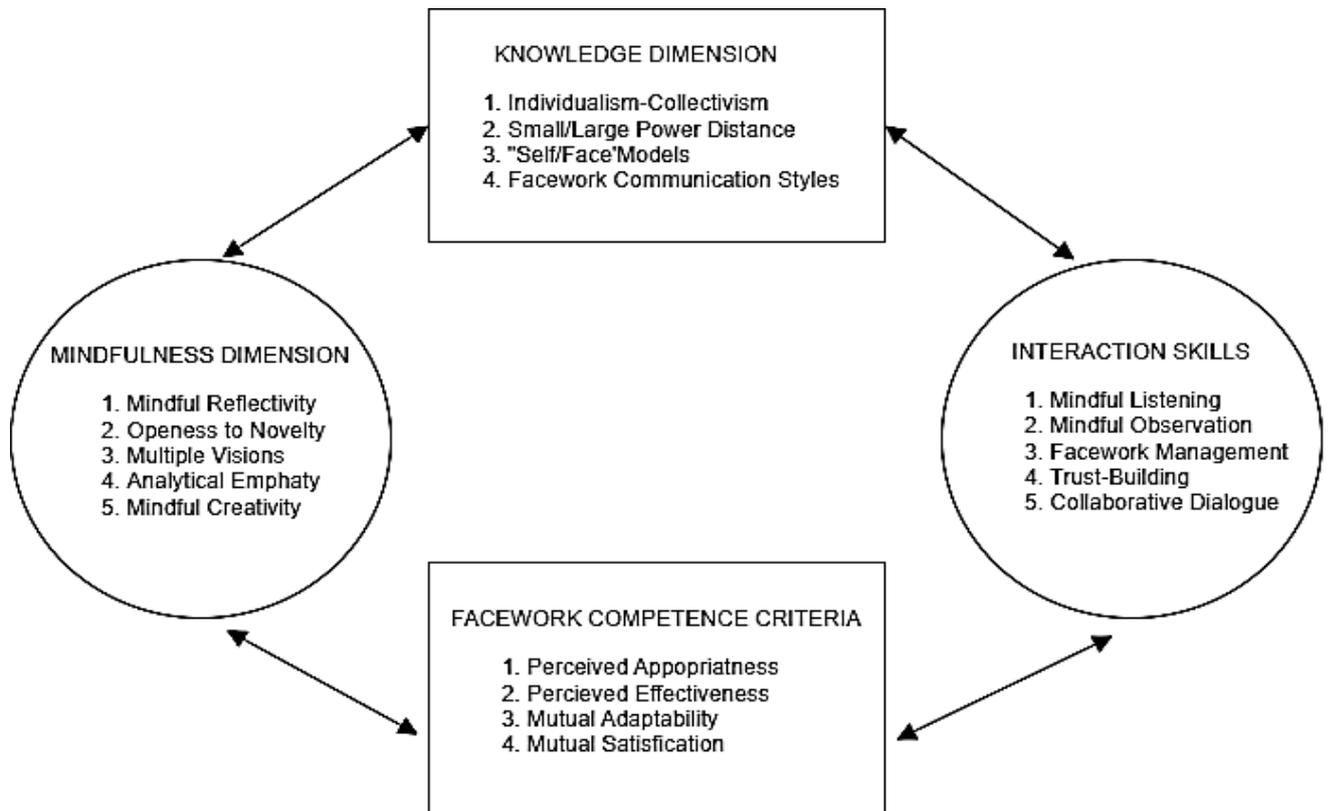
Ada beberapa asumsi yang Toomey kembangkan, yakni 1) masyarakat dalam setiap budaya berusaha untuk menegosiasikan 'wajah' melalui komunikasi di segala situasi. 2) konsep 'wajah' sangat rentan dalam situasi konflik ketika

identitas komunikator dipertanyakan. 3) Variasi dimensi individualisme-kolektivisme mempengaruhi pemilihan orientasi *facework* dalam perilakunya. 5) kekuatan kecil atau besar mempengaruhi preferensi horizontal vs vertikal pada interaksi *facework* (Ting-Toomey, 2011: 16). Identitas kolektif mengarah pada penilaian *facework* terhadap kredibilitas. Sebagai contoh budaya kolektif seperti Tiongkok menjelaskan kesuksesan dalam istilah upaya dan kegagalan berarti kurangnya kemampuan. Dengan melibatkan kritik pada diri sendiri, negara tersebut menciptakan standar tersendiri untuk kembali diterima dalam sebuah kelompok. Masyarakat yang berbeda budaya menggunakan konsepsi wajah untuk mendefinisikan perannya dalam masyarakat.

Dalam menganalisis secara komprehensif mengenai Budaya wajah (*face culture*) yang berimplikasi pada proses diplomasi, penulis mengutip berdasarkan karya Rui Zhang berjudul “*China Struggles for International Recognition—An Explanation from Chinese Face Culture*”(Zhang, 2017). Penelitian ini membahas upaya Tiongkok yang besar untuk mendapat pengakuan seiring dengan pemaknaan atas makna wajah untuk membentuk citra Tiongkok di kancah Internasional. Sehingga untuk memahami alur teori *Face-Negotiation* yang menjadi alat analisis penelitian, penulis menyajikan dalam alur skema sebagai berikut:

Gambar 1. 2

Model Kompetensi Facework: Dimensi Gabungan (Toomey, 2011: 18)



Gambar menunjukkan kompetensi *facework* dalam konflik interkultural. Ada empat klasifikasi yang saling terhubung sebagai kesatuan *facework*. *Pertama*, *Knowledge dimension*, mengungkapkan evaluasi interaksi *facework* mengacu pada pemahaman mendalam atas komparasi variasi budaya. Dimensi ini untuk meninjau perspektif budaya dan asumsi lainnya sebagai pertimbangan. *Kedua*, yaitu *Mindfulness Dimension* yang berkaitan dengan asumsi internal, kognisi dan stimulus berasal dari asumsi lainnya. Berfokus pada indera perasa untuk melihat perilaku tidak familiar dari konteks tertentu. Hal ini dalam rangka membangun visi beragam sebagai substansi level dalam penerimaan dan kehilangan. Selain itu adanya fleksibilitas mental untuk melihat kategori baru yang perlu dipahami (Toomey, 2011: 18-19). *Ketiga*, *Interaction Skill* atau Skill berinteraksi yang

merujuk pada kemampuan dalam berkomunikasi efektif, tepat dan adaptif. Dalam konflik interkultural, komunikator perlu mendengarkan secara intensif dan mengkomunikasikannya secara efektif.

*Terakhir* yakni *Face Work Competency Criteria* atau Kriteria Kompetensi *Facework* berkaitan dengan perilaku yang sesuai dengan ekspektasi budaya tertentu. Nilai budaya memberi pemahaman mengenai ‘sosial dan personal’. Dalam budaya tertentu ‘citra sosial’ diharapkan meraih penampilan peran sempurna. Secara spesifik, wajah mempengaruhi perilaku konflik. Karena dalam situasi konflik, pihak konflik berupaya melindungi kepentingan dan tujuan konflik ataupun kehormatan dengan menyerang tujuan orang lain.

Untuk proses negosiasi penulis mengadopsi penelitian Dr. Daniel Druckman dan Robert Mahoney (Mahoney, 2014) yang berjudul “*Process and Consequences in International Negotiation*” menekankan indikator kunci yang mempengaruhi proses negosiasi yaitu aturan yang dipatuhi oleh para negosiator, perbedaan budaya, gaya dalam negosiasi hingga tingkat kepercayaan antar pihak yang menentukan berhasilnya kesepakatan. Situasi sosial yang tidak pasti seperti negosiasi bisnis dan negosiasi diplomatik yang erat dengan konflik ancaman memicu *face sensitivity* yang menentukan hubungan interpersonal (Ting-Toomey, 2011: 19-20).

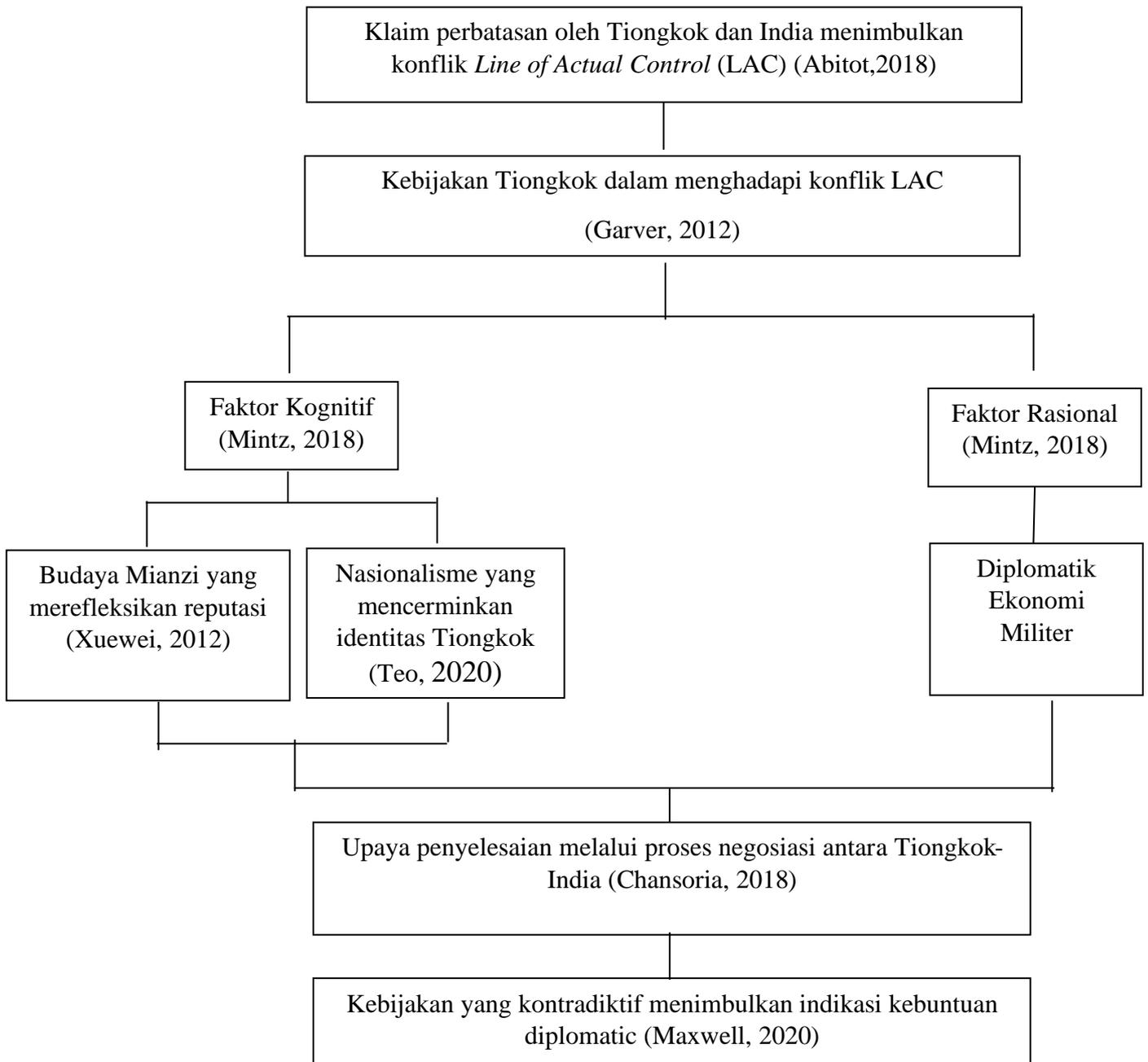
Dalam negosiasi, kedua pihak saling memberitahukan rencana yang dapat menimbulkan serangan. Dalam menghadapi resiko negosiasi tersebut, konsep *Face Threat Sensitivity* (FTS) muncul untuk menilai apakah situasi tersebut *positive face* atau *negative face*. *Positive face* berarti menyampaikan kesantunan dan kooperatif.

Sedangkan *negative face* menilai tindakan pihak yang melanggar kebijakan, membuat pihak lain terlihat buruk dan merampas hak pihak lain (Friedman, Olekalns, & Oh, 2012: 20). FTS aktif dalam mempengaruhi perilaku negosiator dan keputusan negosiasi (White, 2014: 8). FTS dapat memunculkan situasi asimetris dimana salah satu pihak berupaya lebih dari pihak lainnya untuk mendapat output yang diekspektasikan.

Variabel penting yang diwariskan turun temurun masyarakatnya adalah budaya 'wajah'. Konsep 'wajah' (*miànzi*) mengarah pada pemahaman budaya kehormatan dan status sosial. Lu Xun mendeskripsikan 'wajah' sebagai '*guiding principle of the chinese mind*' (Mike, 2020) *Miànzi* relevan dengan keberhasilan melakukan peran sosial yang diakui secara publik oleh anggota masyarakat lainnya (Kwang-kuo, 1987). Nilai *Miànzi* tentu berpengaruh pada pola interaksi Tiongkok dalam politik internasional seperti menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasionalnya.

Dalam kasus sengketa Tiongkok-India, dimana Tiongkok mengalami krisis reputasi akibat ancaman atas perbatasannya dalam LAC oleh India yang bangkit menjadi kekuatan regional baru. *Facework* berkontribusi dalam memberi pertimbangan dalam proses *Critical dimension* dalam tahap *Non-compensatory* yang disesuaikan dengan nilai dan budaya yang dianut. dalam proses *Face Negotiation Theory* menjadi instrumen dalam menganalisis tentang penerapan nilai *Miànzi* oleh Tiongkok dalam menghadapi sengketa LAC tersebut (Wang, 2013: 8).

Sehingga untuk memahami alur pemikiran yang penulis analisis, penulis menyajikan dalam alur skema sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Skema Alur Pemikiran Penelitian

## 1.6 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan dari pendapat para ahli yang telah dipaparkan di dalam sub bab kerangka pemikiran dan dengan menyesuaikan pada kebutuhan penelitian ini, maka definisi konseptual dirumuskan sebagai berikut:

### 1.6 .1 Tahap analisis kognitif

Non kompensatori berbasis dimensi dimana aktor pengambil kebijakan mengevaluasi pilihan-pilihan yang bersumber dari ranah domestik. Situasi politik domestik menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan untuk mengartikulasikan kontor dasarnya. Faktor kontekstual seperti sifat rezim juga menjadi bahan pertimbangan mitra koalisi secara signifikan atas kebijakan yang berhubungan dengan sengketa LAC. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis kebijakan dan sumber kebijakan (Redd, 2003: 18). Konsep Poliheuristik berperan dalam menjelaskan penelitian sebagai berikut

1.6.1.1 Pembuatan keputusan non-kompensatori (*non-compensatory decision making*) atau model hirarki pilihan.

Non-kompensatori sendiri berarti pembuat keputusan mengevaluasi pilihan berdasarkan kesesuaian yang paling tinggi. Para pembuat keputusan dapat menyederhanakan berbagai alternatif kebijakan yang tidak memenuhi kriteria '*critical dimension*'. Keputusan tersebut berdasarkan proses berbasis dimensi (*a dimension-based process*) mengacu pada tahap dimana pembuat keputusan melakukan perbandingan berdasarkan kausalitas alternatif yang sesuai dengan dimensi politik pembuat kebijakan. Tahapan ini dikenal sebagai '*critical*

dimension' untuk menemukan relevansi dari berbagai alternatif dengan politik domestik sebagai standar dari pembuatan keputusan. Kebijakan yang tidak sesuai dengan dimensi politik aktor dieliminasi dalam proses non kompensatori sebelum solusi lain ditemukan. Nasionalisme menjadi salah satu dimensi kritis yang perlu dipertimbangkan. sebagai *'state of mind'*, dan menciptakan kesetiaan tertinggi manusia dalam sebuah bangsa (Kohn, 1959: 59).

#### 1.6.1.2 Perilaku Menghindari Ancaman Politik (*Avoid Political Loss*)

Proses Pencegahan Terancamnya Kekuasaan Politik (*Avoid Political Loss*), yaitu aktor mempertimbangkan kebijakan yang memenuhi kehendaknya meskipun kebijakan ini belum tentu optimal. Kebijakan ini dipilih dengan tujuan agar memuaskan kepentingan dari para pembuat kebijakan.

### **1.6.2 Tahap Analisis Rasional**

Pilihan Rasional merujuk pada tahap lanjutan dalam teori poliheuristik. Pembuat keputusan menentukan solusi optimal dari opsi yang tersisa dengan melakukan perhitungan biaya-manfaat. Kebijakan tersebut dimaksimalkan sesuai dengan kriteria dan prioritas yang diharapkan pemimpin Negara. Selain itu, pembuat keputusan mengejar agenda 'strategi besar' untuk negaranya untuk mengerucutkan pilihan. Negara pemimpin biasanya akan mempertimbangkan pilihan paling aman untuk mengadopsi kebijakan agar terhindar dari situasi berisiko seperti 'hilangnya' wilayah, kedaulatan atau kerjasama (Redd, 2003: 18).

### **1.6.3 Face Threat Sensitivity in Negotiation**

FTS merupakan reaksi afektif baik positif maupun negatif terhadap resiko sebuah negosiasi dimana pihak menilai ada ancaman di dalamnya. FTS mencerminkan bagaimana kelompok atau individu bertindak. Menurut White (2014), pada negosiasi FTS yang aktif menyebabkan pihak bertindak defensive. Sikap defensive ini menurunkan kemampuan bekerja sama bahkan meningkatkan kebuntuan negosiasi. Kebuntuan diplomatik merupakan produk dari pilihan strategi dimana akan terjadi jika adanya ketidaksesuaian dengan kriteria BATNA (*Best Alternative to a Negotiated Agreement*). FTS erat kaitannya dengan penerapan *face work mechanism* di Tiongkok yaitu *Miànzi* (dibaca ‘mee-yan-zer’) merujuk pada konsep sosiologis yang terhubung dengan budaya. Tindakan atau kata-kata yang tidak sesuai dapat menyebabkan seseorang “kehilangan muka”, sedangkan hadiah, penghargaan dan penghormatan dapat “membangun wajah”.

## **1.7 Definisi Operasional**

Berdasarkan uraian definisi konseptual diatas, maka diperlukan definisi operasional sebagai sisi praktikal konsep yang diturunkan sebagai berikut:

### **1.7.1 Tahap analisis Kognitif**

Proses seleksi alternatif kebijakan menurut teori poliheuristik melalui dua tahapan, pertama berdasarkan kognisi. Tahap ini aktor memiliki standar spesifik atas dimensi politiknya baik berupa persepsi, ideologi, budaya, nilai hingga agama. Adanya pengaruh persepsi dari para pemimpin Tiongkok bahwa India tengah

melakukan ‘politik ekspansionisme’ di bawah yang mempengaruhi posisi politik pemimpin Tiongkok menjadi aspek ideologis yang mendorong sengketa LAC.

1.7.1.1 Pembuatan keputusan non-kompensatori (non-compensatory decision making) atau model hirarki pilihan.

*Non-compensatory* merupakan konsep untuk mengeliminasi berbagai pilihan yang tidak sesuai berdasarkan dimensi kritis. Beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan terkait konsep ini adalah

- 1) Bagaimana pemimpin membuat keputusan berdasarkan konsep ini?
- 2) Bagaimana pemimpin menentukan kategori hal yang tidak sesuai dengan dimensi krisis?

Dalam menilai adanya implikasi nasionalisme pada aspek kognitif, penulis mengadopsi kerangka analitis berdasarkan adopsi dari penelitian yang berjudul *Territorial Disputes and Nationalism: A Comparative Case Study of China and Vietnam* oleh Hannah Cotillion (Cotillion, 2017: 61-64). Tipologi nasionalisme dapat dinilai melalui wacana 1) Wacana yang mengandung narasi memicu perselisihan dan narasi anti-foreign sebagai kriteria A; 2) Wacana yang mengandung narasi viktimisasi berdasarkan histori, martabat bangsa sebagai kriteria B. Setiap narasi yang sesuai akan diberi tanda ‘Ya’ untuk kesesuaian, dan ‘Tidak’ bagi kriteria yang tidak sesuai. Kriteria tersebut diringkas menggunakan tabel berikut:

Tabel 1. 1  
Konstruksi Nilai Internal Nasionalisme

Nasionalisme di Sengketa pada Situasi Resmi
Adanya Perselisihan dalam waktu lama
Adanya narasi <i>anti-foreign</i>
Terlibatnya kekerasan atau perang
Narasi yang didasarkan atas histori
Adanya narasi viktimisasi
Adanya narasi untuk martabat dan kehormatan

(Cotillon, 2017: 61-64).

#### 1.7.1.2 Avoid Political Loss

Konsep pada Teori Poliheuristik yang mengedepankan kepentingan mempertahankan eksistensi politik. Adapun pertanyaan yang relevan dengan konsep ini adalah:

- 1) Mengapa negosiator atau pembuat keputusan mempertimbangkan *Avoid Political Loss* dalam konflik LAC?

#### 1.7.2 Tahap Analisis Rasional

Ketika menghadapi sengketa perbatasan, pembuat keputusan secara efektif melihat dari beberapa strategi kebijakan umum untuk dipilih, seperti i) meningkatkan ketegangan dengan mengancam atau menggunakan kekerasan, ii)

untuk mencari penyelesaian damai melalui kompromi, atau iii) mempertahankan *status quo*. Di tengah memanasnya sengketa LAC,, secara rasional Tiongkok memilih strategi non-konfrontatif untuk mempertahankan *status quo* dalam rangka menciptakan stabilitas di kawasan.

### 1.7.3 *Face Threat Sensitivity in Negotiation*

Penulis menggunakan konsep FTS dalam negosiasi untuk menilai relevansi facework *Mianzi* dengan kebuntuan diplomatik dalam negosiasi. Dengan demikian penulis merumuskan definisi operasional FTS dalam Negosiasi sebagai berikut:

- 1) Bagaimana *Face-work Mianzi* mempengaruhi proses negosiasi?
- 2) Apa saja faktor dari *positive* dan *negative face* dalam FTS?

Adapun untuk menganalisis *Mianzi* secara spesifik, penulis mengadopsi model analisis oleh Zhao dan Zhang (2017) dalam tulisannya “*How does face as a system of value-constructs operates through the interplay of Miànzi and lian in Chinese: A corpus-based study*” (Ling Zhou, 2017: 10-12) menilai *Miànzi* berdasarkan representasi wajah dan factor sensitive dalam mekanisme facework berbasis nilai.

Tabel 1. 2  
Konstruksi Nilai Internal *Miànzi*

Unit Kalimat	Makna	Sub kategori	Kode
Akan dihasilkan dari pengamatan berdasarkan sumber yang relevan	Intisari dari kalimat yang mengandung nilai <i>Miànzi</i>	Nilai Kolektivitas Kognitif Nilai Kolektivitas sosial-budaya	1. Kolektivitas 2. Reputasi 3. Legitimasi

(Zhou, 2017: 10-12)

## 1.8 Argumen Penelitian

Argumen utama yang hendak dibangun oleh penulis adalah Tiongkok memandang isu ini sebagai asimetri konflik yang didasarkan pada persepsi dirinya sebagai kekuatan baru regional yang secara agresif mengklaim wilayah di sekitar LAC. Makna *Miànzi* yang berarti ‘wajah’, martabat atau pengakuan dalam lingkungannya yang tinggi dalam keyakinan Tiongkok berpotensi besar mengalami perasaan terhina atas aksi klaim India. Indikasi meningkatnya nasionalisme berelevansi dengan adanya tumpang tindih kepentingan terkait strategi geopolitik baik Tiongkok maupun India pada rentang waktu 1959 hingga 2020. Terlebih prinsip, ideologi dan budaya yang kontradiktif menciptakan sentiment menambah kompleksitas isu ini. Belum adanya indikasi mengalah di antara kedua belah pihak karena internalisasi nasionalisme yang kuat serta adanya kebijakan resolusi yang kontra di antara kedua negara menyebabkan konflik ini mengalami kebuntuan diplomatik (*Diplomatic Deadlock*).

## **1.9 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merujuk pada analisis substansi makna pada sebuah fenomena dengan mengembangkan sebuah paradigma, konsep dasar untuk meneliti fenomena tersebut. Penelitian kualitatif juga mengangkat realita yang berkorelasi dengan masyarakat, gejala-gejala sosial, perilaku, sejarah dan budaya (Ilmiah, 2018: 11). Penelitian ini menggunakan pola deduktif yang mengemukakan premis umum menuju premis khusus yang didukung oleh data baik primer maupun sekunder. Hasil penelitian nantinya bersifat deskriptif atau penjabaran mengenai analisis objek dengan teori dan sumber-sumber lainnya.

### **1.9.1 Tipe penelitian**

Tipe penelitian ini mengarah pada tipe deskriptif yakni memaparkan, mendeskripsikan dan menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian. Tipe deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran atas subjek penelitian (Ilmiah, 2018: 11). Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan implikasi gagasan Tiongkok kuno, *Miànzi* 'wajah' dalam proses negosiasi dengan India dalam isu LAC yang disinyalir mengalami kebuntuan diplomatik (*diplomatic deadlock*) selaras dengan meningkatnya nasionalisme untuk kepentingan nasional Tiongkok terhadap India.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai desk research, sehingga penulis akan memanfaatkan media internet dan studi pustaka (Ilmiah, 2018: 12). Oleh karena itu, penelitian dilakukan di kediaman penulis, yakni di Kabupaten Tegal dan di sekitar

kampus Universitas Diponegoro. Penulis melakukan riset menggunakan akses internet pribadi sehingga tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya di tempat tinggal ataupun lingkungan kampus.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Penelitian ini menyoroti beberapa subjek, yakni Tiongkok sebagai subjek utama dalam penelitian yang berfokus pada rentang waktu konflik (1959-2020). Di dalamnya penulis mengkolaborasikan beberapa pemimpin Tiongkok seperti Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao dan Xi Jinping yang berkorelasi erat dengan kebijakan LAC baik lampau dan terkini. Peneliti menyoroti mengenai bagaimana arah dan proses pembuatan kebijakan mereka yang relevan dengan nilai *Miànzì* juga perwujudan nasionalismenya.

### **1.9.4 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mengacu pada data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau data dari pihak pertama yang bersifat murni tanpa subjektivitas pihak lain. Data primer dapat berupa hasil wawancara dan *press conference* yang dilakukan oleh subjek. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain. Jenis data yang dilampirkan berupa teks, frasa yang merepresentasikan fenomena yang diteliti oleh penulis (Ilmiah, 2018: 12).

### **1.9.5 Sumber Data**

Sumber yang digali oleh penulis dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan data sekunder (George dan Bennet, 2005: 6). Data primer atau data yang

diperoleh langsung dari subjek tanpa subjektivitas pihak lain dapat berupa pernyataan narasumber yang diunggah di situs resmi kenegaraan seperti konferensi resmi dalam isu LAC, dan wawancara dengan Professor Zhao Changfeng, Phd dari *China Normal University*. Sedangkan data sekunder atau pernyataan tidak langsung subjek didapatkan oleh penulis melalui artikel, jurnal dan buku yang kredibel serta memuat informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

#### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan oleh penulis melalui studi kepustakaan karena penelitian ini bersifat desk research. Riset dilakukan oleh penulis melalui library research yaitu mengumpulkan data dari buku-buku atau sumber kepustakaan lainnya. Selanjutnya, internet research yang mengumpulkan data melalui media internet dengan memperhatikan sumber kredibel. Penulis melakukan wawancara efisiensi informasi secara kritis dan dapat dipertanggung jawabkan (Ilmiah, 2018: 11).

#### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam melakukan analisis data, penulis mengadopsi metode *content analysis*. Metode *content analysis* berkaitan dengan instrumen untuk menganalisis narasi mekanisme dalam sebuah situasi dengan hasil atau akibat dalam serangkaian peristiwa dalam sebuah kasus (Ilmiah, 2018: 12). Metode ini melakukan identifikasi rantai kausal yang menghubungkan variabel independen dan dependen (George dan Bennet, 2005: 6). Melalui metode *content analysis* berfokus pada penjelasan melalui deskripsi atas suatu rangkaian peristiwa melalui instrumen teori. Dengan itu penelitian mendeskripsikan secara rinci makna, dampak internalisasi *Miànzì*

oleh masyarakat dan pemimpin Tiongkok. Penulis berusaha menelusuri bagaimana penerapan *Miànzi* dalam nasionalismenya dalam interaksi Tiongkok terhadap India dalam proses negosiasinya melalui sumber primer maupun sekunder secara komprehensif.